

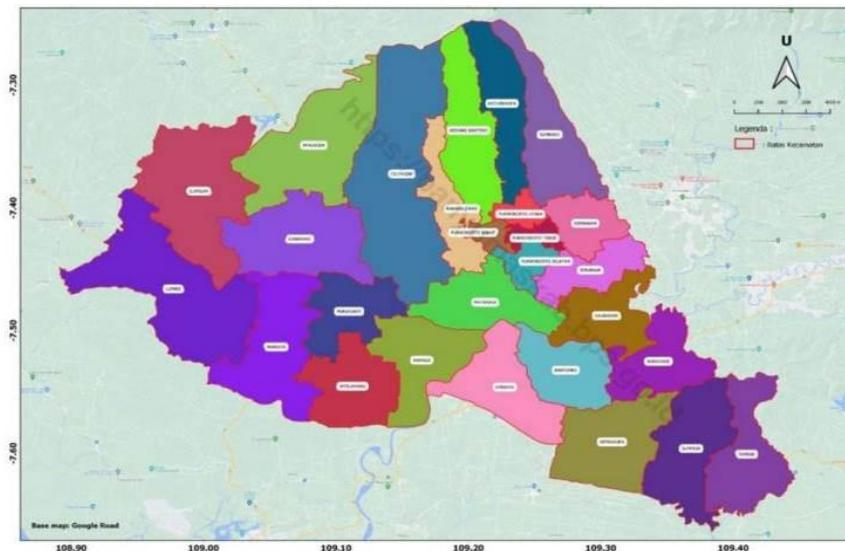
BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

2.1.1. Kondisi Geografis

Dengan luas wilayah 1.335,30 km² atau sekitar 4,04% dari luas Provinsi Jawa Tengah dan memiliki sebaran penduduk sebesar 1.806.013 jiwa/km² pada tahun 2022, Kabupaten Banyumas sendiri terdiri dari 27 kecamatan yang terbagi menjadi 30 kelurahan dan 301 desa.²⁵

Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Banyumas



Sumber: (BPS Kabupaten Banyumas, 2023)

Kabupaten Banyumas yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah memiliki letak astronomis 7° 15' 05" - 7° 37' 10" Lintang Selatan dan antara 108° 39' 17" – 109° 27' 15" Bujur Timur. Kemudian menurut batas-batas geografisnya Kabupaten Banyumas berbatasan dengan daerah-daerah berikut ini:

- A. Di sebelah Utara, kabupaten banyumas berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang;
- B. Sementara itu di bagian Selatan, kabupaten Banyumas berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Cilacap.

²⁵ BPS Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2022. (BPS Kabupaten Banyumas: Banyumas, 2022).

- C. Di sebelah Barat sendiri, Kabupaten Banyumas berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes;
- D. Kemudian yang terakhir, untuk wilayah Kabupaten Banyumas sebelah Timur berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen

Kabupaten Banyumas dengan wilayah antara daratan dan struktur pegunungan, yang salah satunya yaitu bagian dari Lembah Serayu dimanfaatkan untuk pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, sebagian pegunungan misalnya di sebelah selatan lereng Gunung Slamet merupakan perkebunan dan hutan tropis. Kecamatan Cilongok memiliki luas wilayah terbesar yaitu mencapai 105,34 Km², di lain sisi Kecamatan Purwokerto Barat merupakan kecamatan di Kabupaten Banyumas dengan luas wilayah tersempit yaitu luasnya hanya kecamatan 74 Km². Luas wilayah di setiap Kecamatan yang berada di Kabupaten Banyumas secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banyumas

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas(Km ²)
1.	Lumbir	Lumbir	102,66
2.	Wangon	Wangon	60,78
3.	Jatilawang	Tunjung	48,16
4.	Rawalo	Rawalo	49,64
5.	Kebasen	Gambarsari	54,00
6.	Kemranjen	Kecila	60,71
7.	Sumpiuh	Kobokura	60,01
8.	Tambak	Kamulyan	52,03
9.	Somagede	Somagede	40,11
10.	Kalibagor	Kalibagor	35,73
11.	Banyumas	Sudagaran	38,09
12.	Patikraja	Notog	43,23
13.	Purwojati	Purwojati	37,86
14.	Ajibarang	Ajibarang Kulon	66,50
15.	Gumelar	Gumelar	93,95
16.	Pekuncen	Banjaranyar	92,70
17.	Cilongok	Pernasidi	105,34
18.	Karanglewas	Karangkemiri	32,50
19.	Kedungbanteng	Kedungbanteng	60,22
20.	Baturraden	Rempoah	45,53

21.	Sumbang	Sumbang	53,42
22.	Kembaran	Kembaran	25,92
23.	Sokaraja	Sokaraja Wetan	29,92
24.	Purwokerto Selatan	Karangklesem	13,75
25.	Purwokerto Barat	Rejasari	7,40
26.	Purwokerto Timur	Purwokerto Wetan	8,42
27.	Purwokerto Utara	Bancarkembar	9,01
Jumlah			1327,59

Sumber: (BPS Kabupaten Banyumas, 2023)

Kabupaten Banyumas yang memiliki luas wilayah mencapai 1.327,23 Km² tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas membentang cukup luas baik di batas utara sampai selatan maupun, dari batas timur sampai barat. Sebagai ibu kota Kabupaten, Kota Purwokerto yang letaknya hampir di tengah kabupaten Banyumas menyebabkan Kota Purwokerto memiliki jarak yang cukup jauh dengan beberapa kecamatan yang posisinya berada di ujung Kabupaten Banyumas. Jarak antara Kecamatan di Kabupaten Banyumas dengan Kota Purwokerto dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. Jarak antara Kecamatan Menuju Ibukota Kabupaten Banyumas

No.	Kecamatan	Jarak Menuju Ibukota Kabupaten (Km)
1.	Lumbir	41,20
2.	Wangon	31,60
3.	Jatilawang	26,40
4.	Rawalo	22,40
5.	Kebasen	16,80
6.	Kemranjen	26,90
7.	Sumpiuh	31,80
8.	Tambak	37,10
9.	Somagede	22,60
10.	Kalibagor	11,00
11.	Banyumas	16,60
12.	Patikraja	9,10
13.	Purwojati	21,70
14.	Ajibarang	20,20
15.	Gumelar	31,00
16.	Pekuncen	21,40
17.	Cilongok	11,60
18.	Karanglewas	3,30
19.	Kedungbanteng	14,20
20.	Baturraden	7,90
21.	Sumbang	10,50

22.	Kembaran	9,00
23.	Sokaraja	8,20
24.	Purwokerto Selatan	5,00
25.	Purwokerto Barat	2,20
26.	Purwokerto Timur	3,10
27.	Purwokerto Utara	2,20

Sumber: (BPS Kabupaten Banyumas, 2019)

2.1.2. Kondisi Topografis

Kondisi Topografi atau tinggi rendahnya permukaan tanah di wilayah Kabupaten Banyumas sangat beragam. Di beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas terletak di dataran rendah dan beberapa wilayah lainnya terletak di dataran tinggi. Tingkat kemiringan lereng juga sangat bervariasi, mulai dari landai, berbukit sampai dengan curam. Tabel di bawah ini menunjukkan gambaran ketinggian wilayah kecamatan di kabupaten Banyumas dengan rinci.

Tabel 2.3 Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banyumas

No.	Kecamatan	Ketinggian (Mdpl)
1.	Lumbir	19
2.	Wangon	18
3.	Jatilawang	21
4.	Rawalo	54
5.	Kebasen	16
6.	Kemranjen	15
7.	Sumpiuh	17
8.	Tambak	21
9.	Somagede	200
10.	Kalibagor	43
11.	Banyumas	27
12.	Patikraja	25
13.	Purwojati	58
14.	Ajibarang	183
15.	Gumelar	420
16.	Pekuncen	229
17.	Cilongok	230
18.	Karanglewas	110
19.	Kedungbanteng	128
20.	Baturrenden	300
21.	Sumbang	320
22.	Kembaran	74
23.	Sokaraja	36
24.	Purwokerto Selatan	74

25.	Purwokerto Barat	95
26.	Purwokerto Timur	74
27.	Purwokerto Utara	110

Sumber: (BPS Kabupaten Banyumas 2019)

Tanah dan kekayaan Kabupaten Banyumas dinilai masih potensial karena merupakan rumah bagi Pegunungan Slamet yang ketinggiannya kurang lebih 3.400 M di atas permukaan laut dan masih aktif. Kabupaten Banyumas terletak di belahan bumi selatan khatulistiwa dan beriklim tropis yang cenderung lembab. Kabupaten Banyumas yang letaknya di antara perbukitan yang jauh dari pantai/permukaan laut, membuat pengaruh angin laut tidak terlalu terasa. Di daerah pegunungan dan lembah, tekanan udara rata-rata antara 1.001 mbs dan kisaran suhu 21,4 derajat Celcius - 30,9 derajat Celcius.²⁶

2.1.3. Kondisi Demografis

Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.806.013 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,93% sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 908.981 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 897.032 jiwa, dengan angka rasio jenis kelamin sebesar 101,33.²⁷ Penduduk Kabupaten Banyumas sebanyak 6,99% berada di wilayah Kecamatan Cilongok hal ini membuat Cilongok menjadi Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Banyumas. Sementara itu Kecamatan Purwojati menjadi Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Banyumas dengan persentase sebesar 2,09% dari seluruh populasi Kabupaten Banyumas. Di sisi lain, Kecamatan Purwokerto Barat menjadi Kecamatan terpadat, luas wilayah Kecamatan Purwokerto Barat yang hanya 7,40 Km² memiliki jumlah penduduk sebanyak 53,346 jiwa dengan nilai kepadatan penduduk sebesar 7.209 orang/Km². Komposisi jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di tiap kecamatan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

²⁶ Administrator, "Letak Geografis", banyumas.go.id, diakses pada 22 Mei 2023
<https://www.banyumaskab.go.id/page/307/letak-geografis#:~:text=Wilayah%20Kabupaten%20Banyumas%20terletak%20di,di%20belahan%20selatan%20garis%20khatulistiwa.>

²⁷ BPS Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2022. (BPS Kabupaten Banyumas: Banyumas, 2022).

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk tiap Kecamatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Lumbir	25.542	25.004	50.546
2.	Wangon	42.842	41.913	84.755
3.	Jatilawang	34.033	33.450	67.483
4.	Rawalo	27.131	26.580	53.711
5.	Kebasen	34.747	33.903	68.650
6.	Kemranjen	37.279	36.199	73.478
7.	Sumpiuh	29.578	29.002	58.580
8.	Tambak	25.612	25.611	51.223
9.	Somagede	19.066	19.164	38.230
10.	Kalibagor	29.378	28.991	58.369
11.	Banyumas	26.823	26.845	53.668
12.	Patikraja	30.978	31.020	61.998
13.	Purwojati	19.032	18.757	37.789
14.	Ajibarang	52.479	51.011	103.490
15.	Gumelar	27.470	26.877	54.347
16.	Pekuncen	39.061	37.822	76.883
17.	Cilongok	63.943	62.312	126.225
18.	Karanglewas	34.670	33.797	68.467
19.	Kedungbanteng	31.763	31.438	63.201
20.	Baturraden	27.159	26.933	54.092
21.	Sumbang	48.573	47.343	95.961
22.	Kembaran	41.815	40.777	82.592
23.	Sokaraja	45.295	45.230	90.525
24.	Purwokerto Selatan	36.420	36.633	73.053
25.	Purwokerto Barat	26.424	26.925	53.349
26.	Purwokerto Timur	27.226	28.044	55.270
27.	Purwokerto Utara	24.642	25.451	50.093
Kabupaten Banyumas		908.901	897.032	1.806.013

Sumber: (BPS Kabupaten Banyumas 2023)

Kabupaten Banyumas sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke empat di Provinsi Jawa Tengah, di bawah Kabupaten Cilacap, Kota Semarang, dan Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 1.353 orang/km² pada tahun 2022. Angka kepadatan penduduk di tiap kecamatan di Kabupaten Banyumas secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Kepadatan Penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Banyumas

No.	Kecamatan	Luas(Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
1.	Lumbir	102,66	50.546	492,363
2.	Wangon	60,78	84.755	1.394,455
3.	Jatilawang	48,16	67.483	1.401,225
4.	Rawalo	49,64	53.711	1.082,010
5.	Kebasen	54,00	68.650	1.271,296
6.	Kemranjen	60,71	73.478	1.210,311
7.	Sumpiuh	60,01	58.580	976,171
8.	Tambak	52,03	51.223	984,490
9.	Somagede	40,11	38.230	953,129
10.	Kalibagor	35,73	58.369	1.633,613
11.	Banyumas	38,09	53.668	1.408,979
12.	Patikraja	43,23	61.998	1.434,143
13.	Purwojati	37,86	37.789	998,125
14.	Ajibarang	66,50	103.490	1.556,241
15.	Gumelar	93,95	54.347	578,467
16.	Pekuncen	92,70	76.883	829,374
17.	Cilongok	105,34	126.225	1.198,263
18.	Karanglewas	32,50	68.467	2.106,677
19.	Kedungbanteng	60,22	63.201	1.049,502
20.	Baturraden	45,53	54.092	1.188,052
21.	Sumbang	53,42	95.961	1.796,350
22.	Kembaran	25,92	82.592	3.186,420
23.	Sokaraja	29,92	90.525	3.025,568
24.	Purwokerto Selatan	13,75	73.053	5.312,945
25.	Purwokerto Barat	7,40	53.349	7.209,324
26.	Purwokerto Timur	8,42	55.270	6.564,133
27.	Purwokerto Utara	9,01	50.093	5.559,711
Kabupatn Banyumas		1335,30	1.806.013	1.353

Sumber: (BPS Kabupaten Banyumas 2023)

2.1.4. Kondisi Sosial dan Perekonomian

a. Kemiskinan

Dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung dalam kurun waktu hampir tiga tahun menyebabkan permasalahan di berbagai hal, yang salah satunya adalah permasalahan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin mencapai 13,26% dengan jumlah 225,84 ribu jiwa, pada tahun 2021 meningkat menjadi 232,90 ribu jiwa dengan persentase 13,66% , dan pada tahun 2022 turun menjadi 220,47 ribu jiwa dengan persentase 12,84%. Pada tahun tersebut Indeks Kedalaman Kemiskinan yaitu sebesar 1,75

dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,35. Garis kemiskinan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020, 2021, dan 2022 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6. Garis Kemiskinan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2022

Tahun	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan	406.350	417.086	441.520
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	225,8	232,9	220,5
Presentase Penduduk Miskin	13,66	13,56	12,84
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,25	2,35	1,75
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,50	0,57	0,35

Sumber: (BPS Kabupaten Banyumas 2023)

b. Indeks Pembangunan Manusia

IPM atau Indeks pembangunan Manusia didefinisikan sebagai suatu ukuran untuk menilai kemampuan penduduk untuk dapat merasakan atau mengakses hasil dari pembangunan yang digunakannya untuk memperoleh pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Umur panjang yang disertai dengan hidup sehat, diperolehnya pengetahuan yang baik, dan terpenuhinya standar hidup yang layak, merupakan tiga dimensi dasar yang nantinya dapat digunakan untuk mengukur IPM. IPM menjadi salah satu indikator yang krusial dalam mengukur tercapainya hasil yang diinginkan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dalam hal ini masyarakat.

Jumlah tahun rata-rata yang ditempuh oleh penduduk dengan usia 15 tahun ke atas dalam mendapatkan semua strata pendidikan formal yang pernah dijalani atau dengan nama lain Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Penduduk Indonesia memiliki angka RLS mencapai 8,69 tahun pada 2022, dimana angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,15 tahun dibandingkan pada 2021 yang pada saat itu memiliki angka RLS sebesar 8,54 tahun.²⁸ Sementara itu rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 adalah 7,78 tahun.²⁹

²⁸ Dimas Bayu, Rata-rata Lama Sekolah di Indonesia Capai 8,69 Tahun pada 2022, [Dataindonesia.id](https://dataindonesia.id), 16 November 2022, diakses pada 23 Mei 2023

Angka rata-rata lamanya hidup yang dihitung dari sejak lahir yang nantinya akan atau diharapkan dapat dicapai oleh masyarakat merupakan definisi dari angka harapan hidup pada waktu lahir (*Expectation of Life*). Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Penduduk Kabupaten Banyumas memiliki angka harapan hidup pada waktu lahir sebesar 73,72 pada tahun 2020, pada tahun 2021 sebesar 73,80. Sedangkan pada tahun 2022, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Banyumas meningkat menjadi 73,88.³⁰

Angka harapan lama sekolah menjadi komponen pembentuk IPM yang terakhir, dimana angka harapan sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh atau diperoleh oleh anak dengan usia tertentu di masa yang akan datang. Peluang anak dengan usia tertentu tersebut untuk bersekolah di umur-umur selanjutnya diasumsikan sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan di setiap tahunnya untuk angka harapan lama sekolah, yang mana pada tahun 2020 Kabupaten Banyumas mempunyai harapan sekitar 13,85 tahun, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 13,03, dan pada tahun 2022 angka harapan lama sekolah Kabupaten banyumas mencapai 13,21.³¹

c. Perekonomian

Dalam menilai keberhasilan kinerja pembangunan daerah, salah satu indikator utama dalam bidang perekonomian yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan meskipun sempat turun pada tahun 2020. PDRB Kabupaten Banyumas dari tahun 2019-2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7. PDRB Kabupaten Banyumas

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/ratarata-lama-sekolah-di-indonesia-capai-869-tahun-pada-2022>

²⁹ BPS Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2022. (BPS Kabupaten Banyumas: Banyumas, 2022). hlm. 76.

³⁰ Idem.

³¹ Idem.

PDRB Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)			
2019	2020	2021	2022
53.948,86	53.682,12	56.919,82	62.852,91

Sumber: (BPS Kabupaten Banyumas 2023)

Tabel 2.8. PDRB Kabupaten Banyumas

PDRB Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)			
2019	2020	2021	2022
39.121,62	29.779,32	40.686,81	43.069,50

Sumber: (BPS Kabupaten Banyumas 2023)

Kondisi perekonomian Kabupaten Banyumas terus mengalami perbaikan setelah mengalami penurunan hingga -1,65% pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Dimana dapat dilihat pada tabel di atas bahwa perekonomian Kabupaten Banyumas dapat beranjak pulih dimana laju pertumbuhan ekonomi tahun dasar 2020, yaitu sebesar 4%, di tahun 2021 dan naik menjadi 5,86% di tahun 2022. Sektor transportasi dan perdagangan mengalami pertumbuhan tertinggi dengan besaran 83,7%. Meskipun demikian, industri pengolahan tetap berkontribusi paling besar terhadap perekonomian Kabupaten Banyumas, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 25,55% dari PDRB tahun 2022 atau sebesar 16.060 miliar rupiah. Di sisi lain sektor jasa keuangan dan asuransi mengalami pertumbuhan terendah yaitu dengan besaran 0,58%.

d. Kesehatan

Bidang Kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Dimana dalam mendorong produktivitas masyarakat, kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh. Apabila masyarakat memiliki kondisi kesehatan yang prima maka mereka dapat melakukan segala aktivitasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan maksimal yang nantinya turut meningkatkan kesejahteraan. Dalam upaya pembangunan kesehatan dapat melalui, promotif, preventif, kuratif

dan rehabilitatif. Dalam upaya mencegah penyakit pada masyarakat dilakukan tindakan promotif dan preventif.

Peningkatan derajat kesehatan yang baik perlu dilakukan dalam rangka menjamin kehidupan masyarakat yang sehat. Dimulai dari lingkup keluarga yang diawali dengan fase kehamilan, kemudian bayi, balita, anak, remaja, dan dewasa hingga lanjut usia. Adapun faktor-faktor yang turut memengaruhi yaitu antara lain, tercukupinya asupan gizi yang baik dan seimbang, kesadaran serta diterapkannya perilaku hidup bersih dan sehat, serta kemampuan diri dalam mendeteksi penyakit sejak dini. Dalam upaya peningkatan kualitas hidup sehat tersebut tentu sana memerlukan sarana serta prasarana kesehatan yang baik. Sarana dan prasarana tersebut antara lain, tersedianya puskesmas, rumah sakit, posyandu, poliklinik, dan sarana kesehatan yang lainnya. Untuk mengetahui ketersediaan sarana kesehatan di tiap kecamatan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9. Jumlah Sarana Kesehatan di Setiap Kecamatan di Kabupaten Banyumas

No.	Kecamatan	Rumah Sakit		
		2019	2020	2021
1.	Lumbir	-	-	-
2.	Wangon	2	2	2
3.	Jatilawang	-	-	-
4.	Rawalo	-	-	-
5.	Kebasen	-	-	-
6.	Kemranjen	1	1	1
7.	Sumpiuh	2	2	2
8.	Tambak	-	-	-
9.	Somagede	-	-	-
10.	Kalibagor	-	-	-
11.	Banyumas	2	2	2
12.	Patikraja	2	1	-
13.	Purwojati	-	-	-
14.	Ajibarang	1	1	1
15.	Gumelar	-	-	-
16.	Pekuncen	-	-	-
17.	Cilongok	-	-	-
18.	Karanglewas	-	-	-
19.	Kedungbanteng	-	-	-
20.	Baturraden	-	-	-

21.	Sumbang	-	-	-
22.	Kembaran	-	-	-
23.	Sokaraja	2	2	2
24.	Purwokerto Selatan	4	5	5
25.	Purwokerto Barat	4	4	3
26.	Purwokerto Timur	5	5	5
27.	Purwokerto Utara	2	2	2
	Kabupaten Banyumas	27	27	25

Sumber: (BPS Kabupaten Banyumas 2023)

e. Pendidikan

Dalam pembangunan pendidikan dapat dilihat dari aspek 5K yaitu aspek Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Keterjaminan. Dengan limas aspek tersebut harapannya dapat meningkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas pendidikan di Kabupaten Banyumas. Sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Banyumas dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10 Jumlah Sarana dan Prasaran Pendidikan di Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No.	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK	Perguruan Tinggi
1.	Lumbir	10	4	1	1	-
2.	Wangon	12	4	2	2	-
3.	Jatilawang	11	3	2	1	-
4.	Rawalo	9	8	4	1	1
5.	Kebasen	12	5	3	1	-
6.	Kemranjen	15	10	3	2	1
7.	Sumpiuh	14	4	3	2	-
8.	Tambak	12	6	2	2	-
9.	Somagede	9	3	1	1	-
10.	Kalibagor	12	4	1	1	3
11.	Banyumas	12	5	3	1	-
12.	Patikraja	13	4	3	1	-
13.	Purwojati	10	4	2	1	-
14.	Ajibarang	15	6	1	2	1
15.	Gumelar	10	4	3	1	-
16.	Pekuncen	16	9	3	2	-
17.	Cilongok	20	10	2	2	-
18.	Karanglewas	13	6	2	1	-
19.	Kedungbanteng	14	6	2	1	1
20.	Baturraden	12	4	1	1	2
21.	Sumbang	19	6	1	2	-
22.	Kembaran	16	7	3	2	2
23.	Sokaraja	7	5	2	2	2

24.	Purwokerto Selatan	7	6	2	1	5
25.	Purwokerto Barat	6	4	6	1	1
26.	Purwokerto Timur	7	5	5	2	2
27.	Purwokerto Utara	7	1	2	2	3
	Kabupaten Banyumas	331	145	40	39	24

Sumber: (BPS Kabupaten Banyumas 2023)

2.1.5. Kondisi Pemerintahan

Berdiri pada tanggal 6 April 1582, Kabupaten Banyumas yang sebelumnya berbentuk Kadipaten dan merupakan bagian dari Kesultanan Mataram Islam. Dalam bentuknya sebagai Kadipaten, Banyumas masih dipimpin oleh seorang Adipati. Raden Djoko Kahiman merupakan dan Adipati Pertama Banyumas, dengan Gelar Adipati Warga Utama II. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Peraturan Pemerintahan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang No.22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan pasca kemerdekaan Indonesia menjadi dasar hukum berdirinya Kabupaten Banyumas.

Hari Jadi Kabupaten Banyumas diperingati setiap tanggal 6 April, hal ini telah tercantum pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas No. 2 Tahun 1990. Pada Tahun 2015, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 10 Tahun 2015 tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas dan perubahan Perda No.2 Tahun 1990, maka mulai tahun 2016, hari jadi Kabupaten Banyumas diperingati setiap tanggal 22 Februari.

a. Kepala Daerah

Kabupaten Banyumas dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yaitu Bupati Banyumas bersama-sama dengan Wakil Bupati menjalankan pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Dalam sejarahnya, mulai dari awal berdiri saat masih berbentuk Kadipaten sampai dengan sekarang ini, Kabupaten Banyumas telah memiliki 31 Adipati/Bupati, diantaranya:

Tabel 2.11. Tabel Nama Bupati dan Masa Jabatannya di Kabupaten Banyumas

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	R. Djoko Kahiman, Adipati Warga Utama II	1582-1583
2.	R. Ngabehi Merta Sura	1583-1600
3.	R. Ngabehi Merta Sura II	1601-1620
4.	R. Adipati Mertayuda II	1620-1650
5.	R. Tumenggung Martayuda II	1650-1705
6.	R. Tumenggung Suradipura	1705-1707
7.	R. Tumenggung Yudanegara II	1707-1745
8.	R. Tumenggung Reksa Praja	1745-1749
9.	R. Tumenggung Yudanegara III	1749-1755
10.	R. Tumenggung Yudanegara IV	1755-1780
11.	R. Tumenggung Tejakusuma	1780-1788
12.	R. Tumenggung Yudanegara V	1788-1816
13.	Kesepuhan: R. Adipati Cakrawedana Kanoman: R. Adipati Bratadiningrat (R. Tumenggung Martadireja)	1816-1830
14.	R. Tumenggung Martadireja II	1830-1832
15.	R. Adipati Cakranegara I	1832-1864
16.	R. Adipati Cakranegara II	1864-1879
17.	Kanjeng Pangeran Arya Martadireja III	1879-1913
18.	Kanjeng Pangeran Adipati Arya Ganda Subrata	1913-1933
19.	RAA. Sujiman Gandasubrata	1933-1948
20.	RTA. Sapangat Kartanegara	1948-1950
21.	Moh. Kabul Purwodireja	1950-1953
22.	RE. Budiman	1954-1957
23.	M. Mirun Prawiradireja	30 Januari 1957- 15 Desember 1957
24.	R. Bayu Nuntoro	15 Desember 1957- 1960
25.	R. Subagyo	1960-1966
26.	Letkol (Inf) Soekarno Agung	1966-1971
27.	Kol. (Inf) Pudjadi Jaring Bandayuda	1971-1978
28.	Kol. Inf. R. G. Rudjito	1978-1988
29.	Kol. Inf. H. Djoko Sudantoko, S.Sos.	1988-1998
30.	Kol. Arteleri H. M. Aris Setiono SH, S.I.P	1998-2008
31.	Drs. H. Mardjoko, M.M	2008-2013
32.	Ir. H. Achmad Husein	2013-petahana

Sumber: Wikipedia

b. Pilkada Kabupaten Banyumas

Pada masa Orde Baru, Bupati Banyumas selalu ditunjuk dan selalu dari kalangan militer. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Banyumas untuk pertama kali diadakan pada tahun 2003. Pilkada yang dilakukan pada tahun 2003 masih dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten Banyumas hasil Pemilu 1999 dan dimenangkan oleh pasangan Letkol Inf Aris Setiono dan Drs. Imam Durori, MAg.

Adanya semangat otonomi daerah yang digulirkan sejak tahun 1999 mewujudkan perubahan mendasar dari proses demokrasi Indonesia dalam bentuk pemilihan langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 secara langsung menginspirasi diadakannya pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilkada) secara langsung. Untuk itu, sejak tahun 2005 telah diselenggarakan pilkada langsung di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari pasangan calon yang akan dipilih.” Pasangan calon yang akan bertanding dalam Pilkada adalah yang diajukan oleh partai politik atau koalisi partai. Pada tahun 2008, Kabupaten Banyumas menyelenggarakan Pilkada langsung yang pertama kali, dengan diikuti empat pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas. Empat paslon yang mendapatkan perolehan terbaik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12. Peserta Pilkada Kabupaten Banyumas Tahun 2008

No Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Pengusung
1	Drs. H. Mardjoko, M.M	PKB
	Ir. H. Achmad Husein	
2	Singgih Wiranto, SH, M.Hum	Golkar
	Drs. Hj Laily Sofiyah	
3	Drs. Bambang Priyono, M.Si	Partai Demokrat, PKB, PKS
	Dr. Tossy Aryanto, S.E., M.M	
4	Aris Wahyudi B.Eng	PDI-P
	H. Asroru Maula, S.Ag	

Berdasarkan hasil KPU Kabupaten Banyumas, pemenang Pilkada 2008 adalah pasangan calon pertama, Drs H Mardjoko, MM dan Ir. H. Achmad Husein memperoleh 36,3% suara dan berhak diangkat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, dipilih langsung oleh masyarakat Kabupaten Banyumas. Kemudian, pada Pilkada Kabupaten Banyumas tahun 2013, diikuti empat pasangan calon bupati dan wakil kabupaten yang didukung partai politik, dan dua pasangan calon lainnya maju melalui jalur perseorangan atau mandiri. Berikut tabel calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas pada Pilkada Tahun 2013:

Tabel 2.13. Peserta Pilkada Kabupaten Banyumas Tahun 2013

No Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Pengusung
1	Muhsonuddin, S.Ag	Partai Demokrat, PKB, PKPB
	Hendri Anggoro Budi, S.T.,S.E	
2	Drs. H Mardjoko, M.M	Partai Golkar, Gerindra, Hanura
	Dr. Gempol Suwandono, M.MR	
3	Ir. H. Achmad Husein	PDI-P dan PPP
	Dr. Budhi Setiawan	
4	Toto Dirgantoro	Independen
	Saifuddin, S.H	
5	Anteng Tjahyono Widyadi, A.Md	Independen
	Drs. Dwi Basuki	
6	H. Warman, S.H, S.E.,M.M	PAN dan PKS
	Hj. Winarni, S.H.,M.Hum	

Berdasarkan hasil pemungutan suara, Pilkada tahun 2013 hanya berlangsung satu putaran dan KPU menetapkan pasangan calon ke-3, Ir. H. Ahmad Hussain dan Dr. Budhi Setiawan terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara 45,32% dengan dukungan PDI-P dan PPP. Pada tanggal 27 Juni 2018, Bupati Banyumas mengikuti jadwal Pilkada tahun 2018, dan kembali digelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode 2018-2023. Hanya ada dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti Pilkada 2018, antara lain:

Tabel 2.14. Peserta Pilkada Kabupaten Banyumas Tahun 2018

No Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Pengusung
1	Drs. H Mardjoko, M.M	PKB, Gerindra, PAN, PKS, Golkar, PPP
	Dr. H. Ifan Haryanto, M.Sc	
2	Ir. H. Achmad Husein	PDI-P, Demokrat, Nasdem
	Drs. H. Sadewo Tri Lastiono	

Pada hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Banyumas pasangan nomor urut 2 unggul 55,79 % dari pasangan nomor urut 1, Drs. H Mardjoko, M.M dan Dr. H. Ifan Haryanto, M.Sc dengan perolehan suara sebanyak 44,21 %. Sehingga berdasarkan hasil rekapitulasi ini, Ir. H. Achmad Husein kembali terpilih sebagai Bupati Kabupaten Banyumas Periode 2018-2023, yang kali ini berpasangan dengan Drs. H. Sadewo Tri Lastiono sebagai Wakil Bupati Banyumas Periode 2018-2023.

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerahnya sendiri, pemerintah daerah mempunyai otonomi yang sebesar-besarnya dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pemantauan. Landasan utama dibentuknya lembaga-lembaga daerah dalam suatu bentuk organisasi adalah adanya urusan-urusan pemerintahan yang harus ditangani. Namun, bukan berarti harus dibentuk organisasi tersendiri untuk setiap urusan yang berhubungan dengan pemerintah. Besar kecilnya organisasi badan pemerintah daerah paling sedikit mempertimbangkan kemampuan finansial; kebutuhan daerah; ruang lingkup tugas, termasuk tujuan yang ingin dicapai, jenis dan jumlah tugas; ukuran dan kondisi geografis wilayah kerja; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi wilayah sehubungan dengan urusan yang ditangani; sarana dan prasarana untuk menunjang tugas. Oleh karena itu, kebutuhan organisasi kelembagaan daerah tidak selalu sama atau seragam di setiap daerah.

Kantor daerah merupakan bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah. Kepala kantor wilayah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Badan Teknis Daerah adalah unsur yang menunjang tanggung jawab kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan khusus daerah

baik berupa badan daerah, kantor, atau rumah sakit umum. Pimpinan lembaga publik daerah, kantor atau rumah sakit bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Berikut adalah SKPD dalam jajaran Pemerintahan Kabupaten Banyumas:

1. Sekretariat Daerah
2. Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan
4. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
9. Dinas Pendidikan
10. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
11. Dinas Perikanan dan Peternakan
12. Badan Keuangan Daerah
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
18. Dinas Pekerjaan Umum
19. RSUD Ajibarang
20. RSUD Banyumas
21. Inspektorat Kabupaten Banyumas
22. Satuan Polisi Pamong Praja
23. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, P3A
24. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
25. Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

28. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana
29. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

d. Kecamatan, Desa, dan Kelurahan

Kabupaten Banyumas sebagai salah satu daerah otonom terdiri dari 331 desa/kelurahan yang tersebar di 27 kecamatan. Dari 331 desa/kelurahan di Kabupaten Banyumas jumlah kelurahan seluruhnya 30 kelurahan, 27 kelurahan terletak di eks Kota Administratif Purwokerto dan tiga kelurahan berada di Kecamatan Sumpiuh. Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Banyumas dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15. Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Lumbir	10	-
2.	Wangon	12	-
3.	Jatilawang	11	-
4.	Rawalo	9	-
5.	Kebasen	12	-
6.	Kemranjen	15	-
7.	Sumpiuh	11	3
8.	Tambak	12	-
9.	Somagede	9	-
10.	Kalibagor	12	-
11.	Banyumas	12	-
12.	Patikraja	13	-
13.	Purwojati	10	-
14.	Ajibarang	15	-
15.	Gumelar	10	-
16.	Pekuncen	16	-
17.	Cilongok	20	-
18.	Karanglewas	13	-
19.	Kedungbanteng	14	-
20.	Baturraden	12	-
21.	Sumbang	19	-
22.	Kembaran	16	-
23.	Sokaraja	18	-
24.	Purwokerto Selatan	-	7
25.	Purwokerto Barat	-	7
26.	Purwokerto	-	6

	Timur		
27.	Purwokerto Utara	-	7
	Kabupaten Banyumas	301	30

Sumber: (BPS Kabupaten Banyumas 2023)

e. Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 58 Tahun 2005, pemerintah daerah berhak mengelola keuangan daerah sesuai dengan prinsip umum pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus sah, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatuhan, dan kemaslahatan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah harus diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.

Pada tingkat nasional maupun daerah, Produk Domestik Bruto dapat memberi gambaran mengenai kapabilitas suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah pada waktu tertentu. Untuk menyusun Produk Domestik Bruto baik PDB maupun PDRB menggunakan dua pendekatan, yang pertama yaitu pendekatan lapangan usaha, yang kedua dengan pendekatan pengeluaran. Dalam kedua pendekatan tersebut disajikan data berupa nilai tambah yang dirinci berdasarkan sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut penggunaan data tersebut (pengeluaran). Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Banyumas periode 2020-2021 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.16. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2020–2021

Jenis Pendapatan	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah	668.211.148,00	761.991.440,17
Dana Perimbangan	1.854.294.495,00	1.881.829.664,92
Lain-lain Pendapatan yang Sah	807.681.145,00	843.901.795,31
Total	3.330.186.788,00	3.487.222.900,41

Sumber: (BPS Kabupaten Banyumas 2023)

Tabel 2.17. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2020–2021

Jenis Pendapatan	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah	668.211.148,00	761.991.440,17
Dana Perimbangan	1.854.294.495,00	1.881.829.664,92
Lain-lain Pendapatan yang Sah	807.681.145,00	843.901.795,31
Total	3.330.186.788,00	3.487.222.900,41

Sumber: (BPS Kabupaten Banyumas 2023)

2.1.6. Isu Pemekaran Wilayah Kabupaten Banyumas

a. Isu Pemekaran Wilayah

Rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas telah menjadi topik pembicaraan sejak tahun 2003. Pada waktu itu, perubahan status Kota Administratif Purwokerto yang kemudian diputuskan untuk bergabung ke dalam wilayah Kabupaten Banyumas telah menjadi perbincangan utama, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999. Penggabungan tersebut dilakukan karena Purwokerto sebagai Kota Administratif dinilai tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan statusnya menjadi Kota Madya

Pada masa kepemimpinan Bupati Letkol. Inf Aris Setiono (2003-2008), rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas semakin menguat. Aktor-aktor elit politik lokal dianggap menjadi salah satu faktor utama berkembangnya wacana pemekaran tersebut, para aktor politik melakukan memobilisasi masyarakat melalui sebuah wadah yang dirancang oleh dr. Tri Waluyo Basuki, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banyumas (periode 1999-2004). Kelompok ini kemudian diketahui memiliki nama KPB2DO (Komite Pembentukan Banyumas Menjadi Dua Daerah Otonom).³² KPB2DO serta sejumlah aktor politik lokal di Kabupaten Banyumas, termasuk dr. Tri Waluyo Basuki yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banyumas pada periode 1999-2004, berhasil memperkuat isu pemekaran di tengah masyarakat. Selain itu, upaya komunikasi politik yang dilakukan oleh aktor-aktor politik lokal baik di tingkat eksekutif maupun legislatif berdampak signifikan pada pengakuan resmi pemekaran daerah Kabupaten Banyumas dalam RPJD Kabupaten Banyumas tahun 2005-2020.

³² Oktafiani, P. (2009). Policy Community di Daerah (Studi Kasus Tentang Proses Pengajuan Usulan Pemekaran Kabupaten Banyumas). Yogyakarta: UGM.

Pertumbuhan cepat yang dialami Kota Purwokerto, dimana sebelumnya merupakan wilayah Kota Administratif dan ibu kota Kabupaten Banyumas, telah menciptakan ketidakseimbangan dalam perkembangan wilayah lain yang terletak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten tersebut. Dampak dari ketidakseimbangan ini mencakup pertumbuhan ekonomi yang lambat hasil dari pembangunan yang tidak merata dan hanya terpusat di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya serta adanya jarak yang signifikan dari ibu kota Kabupaten ke kecamatan-kecamatan lainnya yang berimbas pada tidak maksimalnya pelayanan publik.

Saat ini, rencana pemekaran Kabupaten Banyumas kembali muncul ke permukaan. Hal ini terkait dengan pelaksanaan proses demokrasi pemilihan umum serentak yang dijadwalkan akan dilakukan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2024. Bupati Banyumas Achmad Husein, yang menjabat pada periode 2013-2018 dan kembali terpilih untuk periode 2018-2023, kembali mengangkat isu pemekaran Kabupaten Banyumas. Pada sebuah acara Festival Kesenian yang diadakan di Alun-Alun Banyumas pada tanggal 14 April 2017, Achmad Husein mengemukakan dua alasan penting untuk melanjutkan perbincangan pemekaran ini. Pertama, pemekaran dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kedua, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Banyumas telah memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk menjadi potensi Ibu kota Kabupaten Banyumas yang baru di masa mendatang.

Proses pemekaran Kabupaten Banyumas terus berlanjut, sejalan dengan amanat yang telah dimasukkan dalam RPJPD Kabupaten Banyumas 2005-2020. Pemekaran kembali menjadi salah satu Isu Strategis Daerah yang diunggulkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Penyusunan RPJMD ini merupakan hasil dari kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas, yang secara bersama-sama mempertimbangkan langkah-langkah terkait pemekaran wilayah ini.³³

³³ Suara Merdeka, Banyumas-Purwokerto Kembali Diusulkan Dipisah, Semarang: Suara Merdeka, 2019

Septian Mukhranto, Kepala Bagian Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Banyumas, mengatakan ada rencana untuk menyerahkan RPJPD dan RPJMD kepada Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2019. Menurut laporannya dalam Suara Merdeka, beliau juga menyatakan bahwa temuan tim peneliti Unsoed menunjukkan bahwa pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas memenuhi syarat dari segi ekonomi. Kondisi Kabupaten Banyumas sebagai Kabupaten Induk dan Kota Purwokerto sebagai Daerah Persiapan juga turut dinilai sudah memenuhi syarat. Meskipun demikian, Septian Mukhranto juga menyoroti permasalahan akses layanan yang memerlukan perhatian khusus. Jika ibu kota kabupaten nantinya ditempatkan di Kabupaten Banyumas, hal ini dapat menambah jarak dan menghambat akses pelayanan di wilayah utara dan barat Kota Purwokerto.³⁴

Pada tahun 2020, proses pemekaran Kabupaten Banyumas mencapai tahap sosialisasi. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan penjelasan kepada berbagai pihak di pendopo Setda Banyumas selama beberapa hari. Peserta sosialisasi meliputi Kepala Desa, camat, BPD, dan LPMK.³⁵ Tahap awal ini dihadiri oleh banyak pihak yang berkepentingan antara lain Bupati Banyumas, Asisten Pemerintahan dan Kesra, DPRD, BPD serta perwakilan tim LPPM Unsoed. Selain itu, peserta (luring) sebanyak 24 orang yaitu para lurah dan lurah wilayah barat, serta peserta yang mengikuti secara daring di tempat masing-masing sebanyak 200 orang.³⁶ Pada kesempatan tersebut, Tim Penelitian LPPM Unsoed menghasilkan beberapa temuan penting mengenai studi pemekaran wilayah otonom baru di Kabupaten Banyumas. Salah satu temuan utama adalah rencana untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Banyumas ke Kecamatan Banyumas, sementara ibu kota Kabupaten Banyumas Barat akan berlokasi di wilayah Kecamatan Wangon.

³⁴ idem

³⁵ Republika. (2020, Februari 17). Republika Online. Retrieved Maret 9, 2020, from Pemekaran Banyumas Diusulkan Jadi 3 Daerah Otonom.

³⁶ TribunJateng.com dengan judul Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Banyumas Menjadi Tiga Daerah Otonom Sampai Tahap Sosialisasi, <https://jateng.tribunnews.com/2020/10/20/rencana-pemekaran-wilayah-kabupaten-banyumas-menjadi-tiga-daerah-otonom-sampai-tahap-sosialisasi>

Dalam rangka memenuhi persyaratan administratif terkait pemekaran Kabupaten Banyumas, semua desa diminta untuk mengadakan Musyawarah Desa Khusus (musdessus). Musdessus ini bertujuan untuk membahas dan mendapatkan persetujuan mengenai pemekaran Kabupaten Banyumas. Untuk melaksanakan musdessus, kepala desa diharapkan bekerja sama dengan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Hasil dari musdessus tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat desa. Dalam sosialisasi ini, beberapa hal yang harus disampaikan meliputi persetujuan pemekaran Kabupaten Banyumas, menjelaskan bahwa status desa serta sumber pendapatan desa tidak akan berubah akibat pemekaran.

Pada Sabtu, 15 Januari 2022, dalam acara peresmian Taman Impean di Desa Karang Sari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Valentinus Sudarjanto Sumito, yang menjabat sebagai Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengumumkan bahwa pihaknya telah menerima berkas usulan pemekaran Kabupaten Banyumas yang diserahkan langsung oleh Bupati Achmad Husein. Menurutnya, pihak Kemendagri akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai indikator termasuk ketersediaan sumber daya manusia, meskipun Kabupaten Banyumas, khususnya Purwokerto sebagai Ibu Kota Kabupaten Banyumas, telah tumbuh menjadi kota yang besar.³⁷

Rencana Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk melakukan pemekaran wilayah nampaknya masih menghadapi hambatan yang mencegah terwujudnya rencana ini dalam waktu dekat. Achmad Husein menjelaskan bahwa sementara dokumen dan persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi, masih ada beberapa kendala yang harus diatasi. Salah satu kendalanya adalah absennya pembahasan rencana pemekaran wilayah Banyumas di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah. Moratorium yang diterapkan pemerintah pusat, diduga menjadi salah satu faktor yang menghambat pembahasan rencana

³⁷ Nashih, Kemendagri: Usulan Pemekaran Kabupaten Banyumas Masih Diproses, *Republika*, 15 Januari 2022, diakses pada 22 Mei 2022, <https://news.republika.co.id/berita/r5qu0i320/kemendagri-usulan-pemekaran-kabupaten-banyumas-masih-diproses>

pemekaran wilayah Banyumas di tingkat provinsi. Sebelumnya, pemerintah pusat mengambil kebijakan penundaan sementara ini untuk memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tingkat nasional.³⁸

b. Analisis Persyaratan Dasar Kewilayahan Hasil Kajian Pemekaran

1. Luas dan Batas Wilayah

Proses pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi dua daerah otonom baru, yaitu Kota Purwokerto dan Kabupaten Banyumas sebagai Kabupaten Induk, berdampak pada perubahan luas wilayah Kabupaten Induk. Dalam konteks analisis spasial dan pendekatan kewilayahan, beberapa kecamatan yang direncanakan akan menjadi bagian dari wilayah Kota Purwokerto meliputi Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Timur, dan Kecamatan Purwokerto Barat, Sumbang, baturraden, Kembaran, Karanglewas. dan Kedung Banteng. Selain itu, ada tambahan beberapa desa dan kelurahan di sekitarnya yang juga akan menjadi bagian dari wilayah Kota Purwokerto.

Tambahan desa dan kelurahan yang akan menjadi bagian dari wilayah Kota Purwokerto terletak di luar batas wilayah Kota Purwokerto. Akibatnya, perubahan ini berdampak pada berkurangnya luas wilayah Kabupaten Banyumas sebagai Kabupaten Induk. Sebagai hasilnya, luas wilayah Kabupaten Banyumas sebagai Kabupaten Induk akan berkurang dari sebelumnya 1.327,23 Km² menjadi 1.234,78 Km². Sementara itu, luas wilayah Kota Purwokerto akan meningkat menjadi 80,03 Km². Perubahan luas wilayah ini menghasilkan perbandingan antara luas Kabupaten Induk dengan Kota Purwokerto sebesar 93,58% berbanding 6,42%.³⁹ Berdasarkan rencana perubahan cakupan wilayah tersebut, Kota Purwokerto yang awalnya terdiri dari 4 Kecamatan akan mengalami penambahan jumlah Kelurahan, meningkat dari sebelumnya 27 kelurahan menjadi 51

³⁸ Bisnis.com dengan judul "Rencana Pemekaran Banyumas Masih Terganjil Moratorium Pemerintah", Klik selengkapnya di sini: <https://semarang.bisnis.com/read/20220618/535/1544916/rencana-pemekaran-banyumas-masih-terganjal-moratorium-pemerintah>.
Author: M Faisal Nur Ikhsan

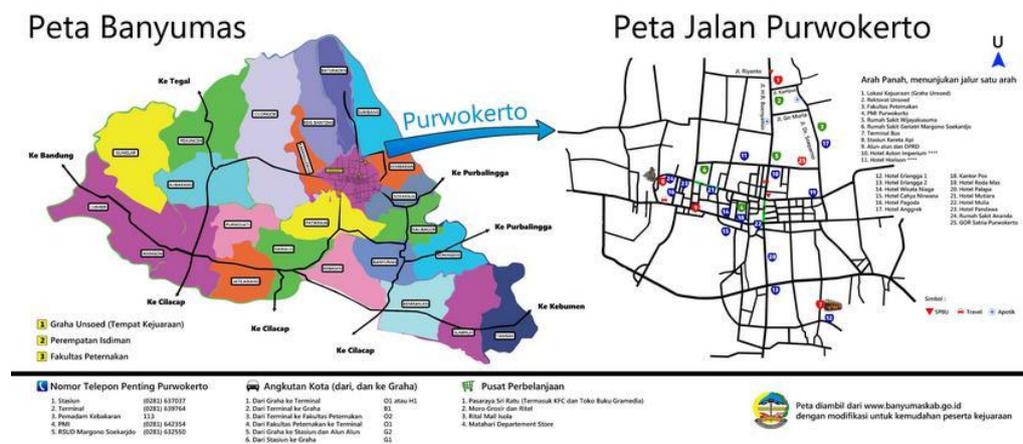
kelurahan. Sementara itu, Kabupaten Banyumas yang semula memiliki 27 Kecamatan dengan 331 desa/kelurahan akan mengalami perubahan menjadi 23 kecamatan dengan 279 desa/kelurahan.

Implikasi dari perubahan cakupan wilayah adalah terjadinya perubahan pada batas administrasi Kabupaten Banyumas. Batas-batas administrasi Kabupaten Banyumas yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara akan berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang;
- Sebelah timur akan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kota Purwokerto, dan Kabupaten Kebumen;
- Sebelah selatan akan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap;
- Sebelah barat akan berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap.

Sementara itu, Kota Purwokerto akan memiliki batas administrasi yang langsung berdekatan dengan Kabupaten Banyumas dari semua arah, karena posisinya akan dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Banyumas.

Gambar 2.2. Peta Gambaran Rencana Pemekaran Kota Purwokerto



2. Lokasi Ibu Kota

Pemilihan ibu kota memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, dari berbagai alternatif yang ada, penentuan ibu kota untuk Kota Purwokerto dipilih pada Kecamatan Purwokerto Timur, sementara ibu kota Kabupaten Banyumas akan berada di Kecamatan Banyumas. Penentuan ini didasarkan pada berbagai alasan yang akan kami sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.18 Alasan Pemilihan Ibukota Kota Purwokerto dan Ibu Kota Kabupaten Banyumas Hasil Pemekaran

No	Kecamatan Purwokerto Timur	Kecamatan Banyumas
1	Secara historis Kecamatan Purwokerto Timur merupakan Ibukota Kabupaten Banyumas sekarang	Secara historis Kecamatan Banyumas merupakan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Banyumas sejak berdirinya sampai dengan tahun 1882
2	Telah tersedianya fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik	Telah tersedianya fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik
3	Lokasi strategis secara geografis, yaitu jarak tempuh yang ideal dari beberapa Kecamatan terjauh	Lokasi strategis secara geografis, yaitu jarak tempuh yang ideal dari beberapa Kecamatan terjauh